

Dampak Kebijakan Bea Keluar Terhadap Kinerja Industri Pengolahan Kakao

(The Impact of Tax Policy On Performance of Cocoa Manufacturing Industry)

Moh. Haifan ^{1*}

¹Program Studi Otomotif, Institut Teknologi Indonesia (ITI), Serpong,
Kota Tangerang Selatan 15320

Abstrak

Indonesia merupakan produsen kakao terbesar ke tiga di dunia setelah Negara Pantai Gading dan Ghana. Volume dan nilai ekspor hingga tahun 2010 cenderung meningkat, namun didominasi ekspor dalam bentuk biji kakao, sementara produk olahan kakao Indonesia masih belum berkembang. Ekspor dalam bentuk biji kakao mengakibatkan kurangnya ketersediaan bahan baku industri dalam negeri yang diindikasikan oleh kinerja industri yang bekerja di bawah kapasitas terpasang. Pemerintah Indonesia menerapkan regulasi melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar bertujuan membatasi ekspor biji kakao untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pemberlakuan PMK Nomor 67/PMK.011/2010 terhadap kinerja industri pengolahan dan ekspor olahan kakao. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pada periode tahun 2008-2012 rata-rata peningkatan produksi kakao nasional sebesar 2,8 persen/tahun dengan rata-rata produktivitasnya masih sangat rendah sebesar 506,4 kg/Ha. Volume ekspor biji kakao periode tahun 2008-2010 terjadi kenaikan rata-rata sebesar 2,4 persen/ tahun, namun pada tahun 2011-2012 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 15,6 persen/tahun. Sementara itu, beberapa kinerja industri pengolahan kakao dalam negeri pada tahun 2010 bekerja di bawah kapasitas terpasang karena kurangnya ketersediaan bahan baku, sedangkan pada periode tahun 2011-2012 terjadi peningkatan produksi mendekati kapasitas terpasang. Dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan PMK Nomor 67/PMK.011/2010 cukup efektif yang diindikasikan oleh penurunan volume ekspor biji kakao, kenaikan kinerja industri dan ekspor olahan kakao.

Kata Kunci : bea keluar, kinerja industri pengolahan, ekspor olahan kakao

Abstract

Indonesia is the third largest cocoa producer in the world after Ivory Coast and Ghana . The volume and value of exports by 2010 is likely to increase , but dominated exports in the form of cocoa beans , while cocoa processed product has not developed yet . Exports of cocoa beans resulted in the lack of availability of raw material of domestic industry which is indicated by the performance of the industry working under capacity. Indonesian government imposed regulations by the Minister of Finance Regulation No. 67/PMK.011/2010 on the Determination of Export Goods subjected Duty and Tariff aimed at restricting exports of cocoa beans to meet the needs of the domestic industry . This study aims to assess the impact of the implementation of PMK No. 67/PMK.011/2010 on the performance of manufacturing and export of processed cocoa . The results showed that in the period 2008-2012 the average increase in national cocoa production by 2.8 percent / year with an average productivity is still very low at 506.4 kg / ha . The volume of cocoa exports in the period 2008-2010 there was an increase on average by 2.4 percent / year , but in 2011-2012 a decline from the previous year of 15.6 percent / year . Meanwhile , some of the performance of the domestic cocoa processing industry in 2010 working under its capacity installed due to lack of availability of raw materials , while in the period 2011-2012 there was an increase of nearly installed capacity . Implementation of the PMK No. 67/PMK.011/2010 quite effective as indicated by a decrease in the volume of exports of cocoa beans , the increase in performance of industry and exports of processed cocoa .

Keyword : export tax and tariff, performance of cocoa industry, export of processed cocoa

*Penulis Korespondensi. Telp:+62 21 7561092; fax: +62 21 7560542

Alamat E-mail : haifan63@yahoo.com

1. Pendahuluan

Selama ini sektor pertanian mampu memberikan kontribusi cukup besar bagi pembangunan ekonomi nasional. Dari sektor pertanian, subsektor perkebunan merupakan penyumbang terbesar kegiatan ekspor produk pertanian. Salah satu komoditas andalan subsektor perkebunan Indonesia adalah kakao dan sampai saat ini Indonesia menjadi produsen kakao terbesar ketiga di dunia. Berdasarkan data tahun 2009-2010, produsen terbesar kakao ditempati oleh Pantai Gading dengan produksi biji kakao sebesar 1,2 juta ton, kemudian diikuti oleh Ghana dengan produksi sebesar 690 ribu ton dan selanjutnya Indonesia sebagai produsen ketiga terbesar di dunia dengan produksi sebesar 535 ribu ton ^[1].

Sentra kakao Indonesia tersebar di Sulawesi (62.3%), Sumatera (17.3%), Jawa (5.6%), Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Bali (4.1%), Kalimantan (3.7%), Maluku dan Papua (7.0%). Pada umumnya tanaman kakao mulai dikembangkan di Indonesia sekitar tahun 1980-an, sehingga sebagian besar tanaman telah memasuki umur yang sudah tua. Oleh karena itu, saat ini produktivitasnya sudah mulai menurun dan sudah saatnya dilakukan budidaya melalui peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi ^[2].

Dalam rangka peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi kakao, pemerintah mulai tahun 2009 telah menerapkan program yang dinamakan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (GERNAS Kakao). GERNAS Kakao dimaksudkan sebagai upaya percepatan peningkatan produktivitas tanaman dan mutu hasil kakao nasional, dengan memberdayakan atau melibatkan secara optimal seluruh potensi pemangku kepentingan serta sumberdaya yang dimiliki. Tujuan GERNAS Kakao adalah untuk meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil ^[3].

Volume dan nilai ekspor kakao Indonesia hingga tahun 2010 cenderung meningkat, namun didominasi ekspor dalam bentuk biji kakao, sedangkan produk olahan kakao Indonesia masih belum berkembang. Salah satu penyebab lambannya perkembangan industri pengolahan kakao/cokelat adalah rendahnya konsumsi cokelat per kapita di Indonesia. Pada tahun 2012, konsumsi cokelat per kapita Indonesia adalah sebesar 0.30 kg, masih sangat jauh di bawah konsumsi perkapita penduduk Eropa yang mencapai sekitar 5 kg ^[4]. Dengan alasan masih belum berkembangnya industri pengolah biji kakao dan rendahnya tingkat konsumsi cokelat dalam negeri,

mengakibatkan sebagian besar biji kakao Indonesia di ekspor dengan tujuan utama negara-negara di benua Amerika dan Eropa.

Peningkatan ekspor dalam bentuk biji kakao akan berdampak pada kinerja industri pengolahan kakao dalam negeri yang diindikasikan oleh kinerja beberapa industri pengolahan kakao yang bekerja di bawah kapasitas terpasang. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya ketersediaan bahan baku biji kakao yang mensuplai kebutuhan industri pengolahan kakao dalam negeri.

Mencermati permasalahan tersebut, maka pemerintah membuat regulasi melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Bea keluar diterapkan secara *advalorem*, yaitu jika harga biji kakao di bawah US\$ 2,000 per ton, maka tidak akan dikenakan bea keluar sama sekali, namun ketika harga biji kakao berada di kisaran antara US\$ 2,000-US\$ 2,750 per ton akan dikenakan bea keluar sebesar 5%. Bea keluar akan naik menjadi 10% dan 15% apabila harga biji kakao meningkat berturut-turut menjadi US\$ 2,750-US\$ 3,500 per ton dan lebih dari US\$ 3,500 per ton. Penetapan bea keluar terhadap ekspor biji kakao dimaksudkan untuk menjamin pasokan kebutuhan bahan baku industri pengolahan kakao nasional dan mendorong pertumbuhan industri hilir kakao dalam negeri. Selain itu, juga diharapkan dapat berdampak positif pada meningkatnya ekspor kakao olahan yang lebih bernilai tambah ^[5].

Dalam rangka evaluasi kinerja regulasi BK kakao, maka perlu kajian dampak pemberlakuan bea keluar kakao terhadap kinerja industri pengolah kakao dan ekspor produk olahan kakao. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pemberlakuan PMK Nomor 67/PMK.011/2010 terhadap kinerja industri pengolahan dan ekspor produk olahan kakao. Secara rinci, tujuan penelitian adalah: a) mendapatkan gambaran kinerja produksi kakao nasional, b) menganalisis kinerja ekspor dan impor biji kakao dan olahan kakao, c) mempelajari perkembangan kinerja industri pengolahan kakao nasional, d) mendapatkan gambaran hambatan pasar dunia olahan kakao

2. Metodologi

Pendekatan dan Metode Analisis

Penetapan BK terhadap ekspor biji kakao dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan baku untuk kebutuhan industri pengolahan dan mendorong

berkembangnya industri hilir kakao dalam negeri. Peningkatan kapasitas produksi industri pengolahan diharapkan dapat berdampak pada meningkatnya ekspor produk olahan kakao yang mempunyai nilai tambah (*value added*) yang selanjutnya memberikan dampak ikutan (*multiplier effect*) terhadap penyerapan tenaga kerja, penguatan struktur industri kakao, peluang investasi serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani kakao.

Untuk menganalisis dampak regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 dapat dilakukan melalui pendekatan diskriptif terhadap data-data yaitu dengan membandingkan kondisi kinerja ekspor biji kakao dan industri pengolahan biji kakao dengan menggunakan perbandingan *before and after intervention*. Analisis hanya difokuskan untuk membandingkan kondisi kinerja ekspor biji kakao, industri pengolah biji kakao dan ekspor olahan kakao, baik sebelum maupun setelah pemberlakuan bea keluar. Beberapa indikator yang akan digunakan untuk mengevaluasi dampak kebijakan tersebut, diantaranya : 1) tren/ kecenderungan kinerja ekspor biji kakao sebelum dan sesudah diberlakukannya ketentuan bea keluar, 2) perubahan kapasitas produksi industri pengolahan kakao, 3) perubahan volume ekspor produk olahan biji kakao relatif dibandingkan perubahan volume ekspor biji kakao, 4) tren/ kecenderungan ekspor beberapa jenis olahan kakao.

Analisis perubahan kapasitas produksi industri pengolahan kakao, selain dilakukan dengan menggunakan data sekunder, juga dilakukan dengan wawancara (*in-depth interview*) pada beberapa perusahaan atau industri pengolahan kakao yang berada di Tangerang, Provinsi Banten. Beberapa informasi yang dibutuhkan, diantaranya kapasitas terpasang, kapasitas terpakai, perkembangan produksi periode tahun 2008 - 2012 dan permasalahan lain yang terkait dengan kinerja produksi pengolahan kakao, selanjutnya dilakukan analisis diskriptif-kualitatif.

Untuk mengetahui sejauh mana potensi dan tantangan pengembangan ekspor produk olahan kakao, perlu dilakukan penilaian pada kinerja ekspor produk olahan kakao. Dalam kajian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja ekspor produk olahan kakao adalah pertumbuhan ekspor, komposisi produk serta potensi dan hambatan ekspor olahan kakao.

Kebutuhan Data

Untuk melakukan analisis di atas diperlukan data primer dan sekunder. Data

primer didapatkan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) ke beberapa industri pengolahan kakao. Data sekunder didapatkan dari beberapa sumber, diantaranya : a) berbagai laporan penelitian maupun artikel terkait b) berbagai data yang dikeluarkan oleh instansi/ lembaga terkait, diantaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, *International Trade Center* (ITC), Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI), dan sebagainya.

3. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Produksi Kakao Nasional

Perkembangan produksi kakao nasional periode tahun 2008-2012 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh meningkatnya luas areal tanam. Pada tahun 2008 luas areal perkebunan kakao di Indonesia mencapai 1.425.100 Ha, sedangkan pada tahun 2012 luas areal perkebunan tersebut meningkat menjadi 1.732.954 Ha atau terjadi rata-rata kenaikan sebesar 4,3 persen/ tahun. Sementara itu, produksi kakao pada tahun 2008 sebesar 803.544 ton, sedangkan pada tahun 2012 meningkat menjadi 936.266 ton atau rata-rata kenaikan sebesar 3,3 persen per tahun dengan rata-rata produktivitas sebesar 506 Kg/ Ha seperti terlihat pada Tabel 1 [6].

Tabel 1. Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Kakao Nasional Tahun 2008-2012

Tahun	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
2008	1.425.110	803.594	563
2009	1.587.136	809.583	510
2010	1.650.621	837.918	508
2011	1.732.641	712.231	411
2012	1.732.954	936.266	540

Sumber : Direktorat Jendral Perkebunan, 2013

Peningkatan luas areal dan produksi kakao periode tahun 2008-2012 sebagai dampak positif terhadap program GERNAS Kakao yang digulirkan oleh pemerintah. Program GERNAS Kakao meliputi peremajaan perkebunan seluas 70 ribu Ha, rehabilitasi 235 ribu hektare lahan kakao, intensifikasi pada 145 ribu hektar lahan, serta pengendalian hama pada 450 ribu hektar lahan kakao. Program GERNAS menitikberatkan pada peningkatan kapasitas produksi kakao di beberapa wilayah, yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Bali, Maluku dan Papua.

Rata-rata produktivitas kakao Indonesia periode 2008-2012 sebesar 506,4 kg/Ha, nilai tersebut masih sangat rendah jika dibandingkan dengan produktivitas kakao di Negara lain, misalnya Pantai Gading sebesar 1.500 kg/Ha. Rendahnya produktivitas kakao Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagian besar tanaman tua/rusak, belum menggunakan benih unggul, kurang perawatan, terserang hama dan penyakit utama, seperti Penggerek Buah Kakao (PBK), *Vascular Streak Dieback* (VSD) dan busuk buah serta rendahnya tingkat diseminasi teknologi akibat minimnya tenaga penyuluh dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung [7].

Perkembangan Produksi Dan Volume Ekspor Biji Kakao

Pada **Tabel 2** menunjukkan perkembangan produksi, dan volume ekspor biji kakao. Pada periode tahun 2008-2012 terjadi peningkatan produksi biji kakao nasional dengan rata-rata kenaikan sebesar 2,8 persen per tahun. Sementara itu, volume ekspor periode tahun 2008-2010 terjadi peningkatan, namun mulai periode 2011-2012 terjadi penurunan. Demikian juga prosentase ekspor dibandingkan dengan produksi menunjukkan kecenderungan yang sama. Pada periode tahun 2010-2012 prosentase ekspor semakin mengecil, hal ini berarti biji kakao diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri.

Tabel 2. Produksi, Volume Ekspor, dan Persentase Ekspor Terhadap Produksi Biji Kakao Nasional Tahun 2008-2012

Tahun	Produksi (Ton)	Volume Ekspor (Ton)	Persentase (%)
2008	803.594	515.500	64
2009	809.583	535.200	66
2010	837.918	552.900	65
2011	712.231	410.200	57
2012	936.266	388.000	41

(Sumber : Direktorat Jendral Perkebunan, Kementerian Pertanian, 2013)

Dengan memperhatikan kecenderungan tersebut, maka penurunan volume ekspor biji kakao periode 2011-2012 disebabkan oleh pemberlakuan bea keluar (BK) sesuai dengan PMK No. 67 Tahun 2010 yang diberlakukan mulai 1 April 2010.

Perkembangan Nilai Ekspor Biji Dan Olahan Kakao

Perkembangan nilai ekspor biji kakao periode tahun 2008-2010 mengalami kenaikan, namun periode 2011-2012 mengalami penurunan. Sementara itu, nilai ekspor olahan kakao, berupa *cocoa powder*, *cocoa butter*, *cocoa paste* dan *chocolate* periode tahun 2008-2012 cenderung mengalami kenaikan, namun total nilai ekspor pada periode 2010-2012 mengalami penurunan tiap tahunnya akibat menurunnya nilai ekspor biji kakao seperti ditunjukkan pada **Tabel 3** [8].

Tabel 3. Perkembangan Nilai Ekspor Biji Kakao Tahun 2008-2012 (dalam US\$ ribu)

Produk	Nilai Ekspor (US \$ ribu)				
k	2008	2009	2010	2011	2012
<i>Coco</i>					
<i>a</i>	854,5	1,087,4	1,190,7	614,4	384,8
	83	85	40	96	30
<i>Bean</i>					

(Sumber : International Trade Center, 2013)

Tabel 4. Perkembangan Nilai Ekspor Olahan Kakao Tahun 2008-2012 (dalam US\$ ribu)

Produk	Nilai Ekspor (US \$ ribu)				
	2008	2009	2010	2011	2012
<i>Cocoa Bean</i>	59,574	76,312	89,497	62,881	62,978
<i>Cocoa Powder</i>	11,638	21,609	40,629	45,884	56,001
<i>Cocoa Butter</i>	81	33	49	235	148
<i>Cocoa Paste</i>	4,763	1,627	6,906	27,710	12,382
<i>Chocolate</i>	42,668	21,657	27,178	38,757	45,380
Total	118,724	121,247	164,259	175,467	176,889

(Sumber : International Trade Center, 2013)

Seperti ditunjukkan pada Tabel 3 dan 4, pengaruh pemberlakuan bea keluar yang diterapkan per 1 April 2010 berdampak pada menurunnya nilai ekspor biji kakao, namun sebaliknya meningkatkan nilai ekspor olahan kakao. Hal ini disebabkan ketersediaan pasokan bahan baku biji kakao untuk kebutuhan produksi industri dalam negeri, sehingga industri pengolahan kakao dapat meningkatkan kapasitas produksinya.

Kinerja Industri Pengolahan Kakao

Pada saat ini tercatat sebanyak 16 buah industri pengolahan kakao yang tersebar di enam provinsi, yaitu lima buah di Provinsi Banten, lima buah di Sulawesi Selatan, masing-masing dua di Jawa Barat dan Jawa Timur, serta

masing-masing satu buah di Sumatera Utara dan Sulawesi Tenggara. Pengembangan industri olahan kakao di Indonesia agak terhambat. Penyebab kondisi tersebut, antara lain adalah rendahnya pasokan bahan baku biji kakao, kesulitan mendapatkan biji kakao terfermentasi, juga karena adanya penetapan pajak pertambahan nilai (PPN) 10% bagi kakao yang dijual untuk industri olahan dan PPN 0% untuk ekspor.

Tabel 5. Kinerja Beberapa Industri Kakao Tahun 2008-2012

Tahun	PT Sekawan Karsa Mulia		PT Bumi Tangerang Mesindotama	
	Kapasitas Terpasang (Ton)	Kapasitas Terpakai (Ton)	Kapasitas Terpasang (Ton)	Kapasitas Terpakai (Ton)
2008	7.300	4.500	75.000	45.000
2009	7.300	4.800	75.000	45.000
2010	7.300	5.700	75.000	45.000
2011	7.300	6.000	75.000	65.000
2012	7.300	6.300	75.000	75.000

(Sumber : Hasil Wawancara, 2013)

Pada **Tabel 5** menunjukkan bahwa beberapa industri pengolahan kakao yang berlokasi di Tangerang, Provinsi Banten (PT Sekawan Karsa Mulia dan PT Bumi Tangerang Mesindotama) menunjukkan peningkatan kapasitas produksi tiap tahunnya mendekati kapasitas terpasang. Hal ini disebabkan oleh terpenuhinya pasokan bahan baku biji kakao dalam negeri. Dengan pemberlakuan regulasi PMK No. 67 Tahun 2010 yang diberlakukan mulai 1 April 2010 berdampak pada peningkatan kinerja industri pengolahan kakao dalam negeri.

Hambatan Perdagangan/Ekspor Olahan Kakao

Hambatan perdagangan yang dikenakan pada produk olahan kakao Indonesia sangat beragam, mulai dari pemberlakuan tarif yang kurang adil, hingga perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh beberapa Negara. Negara China, Malaysia, India dan Eropa mengenakan tarif bea masuk yang tinggi terhadap produk kakao Indonesia berkisar antara 15 sampai 38 persen. Sementara itu, Eropa menerapkan hambatan tarif produk olahan kakao, sebagai berikut : a) produk olahan kakao berupa *cocoa paste* dikenakan tarif masuk sebesar 9,6 persen ditambah *preference tariff* sebesar 6,10 persen, b) produk *cocoa butter* dikenakan tarif impor sebesar 7,7 persen ditambah *preference tariff* sebesar 4,2 persen, c) produk *cocoa powder* dikenakan tarif impor

sebesar 8 persen ditambah *preference tariff* sebesar 2,8 persen, d) produk makanan coklat dikenakan tarif impor sebesar minimal 50 persen. Untuk pasar Amerika Serikat menerapkan tarif spesifik untuk produk *cocoa butter* sebesar 0,52 sen/kg^[9].

Dengan adanya hambatan perdagangan produk olahan kakao Indonesia oleh beberapa Negara, diharapkan pemerintah Indonesia proaktif melakukan pendekatan kepada Negara importir untuk mengurangi/ menghilangkan hambatan tarif yang dapat merugikan kinerja ekspor olahan kakao Indonesia.

4. Kesimpulan

Pemberlakuan regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar terhadap biji kakao memberikan dampak positif pada penurunan ekspor biji kakao, peningkatan kinerja industri pengolahan dan peningkatan ekspor olahan kakao. Peningkatan kinerja industri pengolahan kakao diharapkan dapat memberikan efek ganda (*multiplier effect*) pada peningkatan penyerapan tenaga kerja, penguatan struktur industri kakao, peluang investasi serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih ditujukan kepada DIKTI yang telah memberikan dana penelitian pada kegiatan Penelitian Dosen Pemula tahun anggaran 2013 dengan Kontrak No: 45/SP/LP3M-ITI/VIII/2013.

Daftar Pustaka

- [1] 2013. *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Kakao di Indonesia* (Online), (http://www.ipard.com/art_perkebunan, diakses pada tanggal 23 Nopember 2013).
- [2] Maswadi, Agribisnis Kakao dan Produk Olahannya Berkaitan Dengan Kebijakan Tarif Pajak Di Indonesia. *Jurnal Teknologi Perkebunan dan PSDL* Vol. 1, No. 2, Desember 2011, hal 23-30. 2011.
- [3] 2013. *Petani Berharap Gernas Kakao Berlanjut* (Online), (<http://www.antarasultra.com/>, diakses pada tanggal 20 Nopember 2013).
- [4] 2013. *Konsumsi Coklat Per Kapita di Indonesia Masih Sangat Rendah* (Online),

(<http://www.neraca.co.id/industri/>, diakses pada tanggal 20 Nopember 2013).

- [5] R. Pradipto, Tri Widodo, A.S. Hardi. Evaluasi Kebijakan Bea Keluar Biji Kakao. *Laporan Penelitian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*. 2012.
- [6] [KEMENTAN] Direktorat Jenderal Perkebunan. Statistik Perkebunan Kakao. Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian. Jakarta. 2013.
- [7] D.J. Rachbini, Bustanul Arifin, Ahmad Erani Yustika. Strategi Percepatan Dan Perluasan Agroindustri. *Laporan Penelitian, Kementerian Perindustrian RI*. 2011.
- [8] [ITC] International Trade Center. Trade Map (Online), (<http://www.entracen.org/tradstat>, diakses 12 Nopember 2013). 2013.
- [9] B. Dradjat, S. Raharja, R. Kustiari, Indrawanto. Deregulasi Perdagangan Domestik Biji Kopi dan Kakao: Peningkatan Nilai Tambah Domestik Minimal 10 Persen Setelah Implementasi. *Laporan Penelitian Kerjasama Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan dengan PT. Riset Perkebunan Nusantara, Bogor*. 2010.